

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PERAMPASAN BARANG OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (Studi Putusan Nomor 3174/K/PDT/2024)

Fandy Gultom, 2410622011, Heru Sugiyono, Aurora Jillena Meliala.

Perampasan objek jaminan fidusia oleh negara menimbulkan konsekuensi yuridis yang merugikan bagi penerima fidusia, khususnya karena adanya ketidaksesuaian dan inkonsistensi sikap negara yang berakibat pada hilangnya hak perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan dalam tatanan praktik, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu perlindungan terhadap hak milik dalam kerangka konstitusional. Dalam praktiknya, justru terjadi situasi di mana negara merampas objek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga secara tidak langsung menghilangkan hak milik perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia. Ironisnya, perusahaan pembiayaan yang beriktikad baik tersebut kemudian dibebani kewajiban untuk membuktikan iktikad baiknya atas objek jaminan fidusia yang telah dirampas oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perampasan oleh negara terhadap objek jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum debitur bagi kreditur, serta menganalisis perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara seharusnya melindungi pemilik yang sah atas objek jaminan fidusia, namun praktik perampasan oleh negara justru menghilangkan hak penerima fidusia dan tidak adanya parameter iktikad baik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun perusahaan pembiayaan yang tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam tindak pidana dapat menempuh upaya hukum preventif, seperti meminta diakui sebagai saksi korban dan menuntut kepastian pelunasan utang, serta upaya represif berupa gugatan perbuatan melawan hukum, laporan kepolisian, dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan pidana guna mempertahankan haknya. Sehingga diperlukan pembentukan regulasi khusus terkait perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, perlunya standar normatif yang jelas untuk menilai iktikad baik dan kewajiban, serta pentingnya penguatan klausul jaminan tambahan dalam perjanjian pembiayaan guna melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perampasan Negara, Iktikad Baik

ABSTRACT

ISSUES REGARDING THE SEIZURE OF PROPERTY SERVING AS SECURITY UNDER A FINANCING AGREEMENT (A Study of Judgment No. 3174/K/PDT/2024)

Fandy Gultom, 2410622011, Heru Sugiyono, Aurora Jillena Meliala.

The seizure of fiduciary collateral by the state creates legal disadvantages for financing companies as fiduciary beneficiaries, particularly due to the state's inconsistent approach, which results in the loss of their right to execute the collateral. This issue not only affects legal practice but also raises fundamental concerns regarding the protection of property rights within a constitutional framework. In practice, state seizure of collateral indirectly eliminates the rights of financing companies, even when they act in good faith, and places on them the burden of proving such good faith. This study analyzes state seizure of fiduciary collateral arising from the debtor's unlawful acts and examines the legal protection available to financing companies. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by legal materials analyzed qualitatively. The research results show that the state should protect the rightful owner of fiduciary collateral objects; however, the practice of seizure by the state instead extinguishes the rights of fiduciary recipients, and the absence of parameters for good faith gives rise to legal uncertainty. As for financing companies that are not involved, either directly or indirectly, in a criminal act, they may pursue preventive legal remedies, such as requesting recognition as a victim-witness and demanding certainty regarding debt repayment, as well as repressive remedies in the form of tort claims (unlawful act lawsuits), police reports, and third-party opposition (derden verzet) against criminal court decisions in order to defend their rights. Therefore, specific regulations are needed to protect third parties acting in good faith, along with clear standards for assessing good faith and reasonableness. Strengthening guarantee clauses in financing agreements is also necessary to better protect the interests of financing companies.

Keywords: Fiduciary Security, State Seizure, Good Faith